



## Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (Pkbi) Cabang Subang Kabupaten Subang

**Silvy Sondari<sup>1</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

[Silvysondari.gadzali@gmail.com](mailto:Silvysondari.gadzali@gmail.com)

**Adenawawi<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

[adenawawi15.an@gmail.com](mailto:adenawawi15.an@gmail.com)

**Ine Mariene<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

[ine.mariene@unpas.com](mailto:ine.mariene@unpas.com)

### Abstrak

Kebijakan pengelolaan keuangan PKBI berbeda dari lembaga lainnya, dari mulai pengelolaan keuangan yang lebih rumit sampai data yang transparan dan juga *detail*. Kebijakannya sangat unik, berdasar pada prosedur/aturan GF-ATM yang mana GF-ATM (*Global Fun for AIDS, TB and Malaria*) adalah organisasi dunia yang berperan salah satunya untuk menghentikan penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* adalah sekumpulan gejala dan infeksi). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai kebijakan pengelolaan keuangan yang ada di PKBI Cabang Subang Kabupaten Subang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi yang mengumpulkan data secara langsung pada objek diteliti di tempat PKL, teknik wawancara dengan cara bertanya secara langsung dengan pembimbing atau instruktur dan pegawai kantor lainnya dan menggunakan teknik literatur dengan membaca beberapa buku terkait judul yang penulis ambil untuk menunjang dalam penulisan laporan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan dalam kantor PKBI Cabang Subang memang rinci, namun dalam beberapa pengelolaan keuangan dan beberapa kebijakan yang mereka jalankan masih belum bisa disebut transparan, terutama bagian data maupun informasi terkait dengan judul yang penulis ambil.

**Kata kunci :** Kebijakan pengelolaan keuangan dan GF-ATM.

### Abstract

*PKBI's financial management policy is different from other institutions, from the start financial management of more complicated until data transparent and also detail. The policy is very unique, based on the procedures/rules of the GF-ATM (Global Fun for AIDS, TB and Malaria) where GF-ATM is a global organization whose role is to stop AIDS (Acquired Immune*



*Deficiency Syndrome is a collection of symptoms and infections). This writing aims to find out various financial management policies of PKBI Subang Branch Subang Regency. Data collection uses observation techniques that collect data directly on the object under study at street vendors, interview techniques by asking questions directly with the supervisor or instructor and other office employees and using literature techniques by reading several books related to the title that the authors take to support in writing the report. The results of this study indicate that the financial management policies in the Subang PKBI branch office are indeed detailed, but in some financial management and some of the policies they have carried out they still cannot be called transparent, especially the data and information section related to the title that the writer took.*

**Keywords:** *Financial management policy and GF-ATM*

## **Pendahuluan**

Kebijakan pengelolaan keuangan adalah kebijakan yang dilakukan agar sektor keuangan dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis. Hal ini perlu dilakukan mengingat pentingnya dampak sektor keuangan bagi kehidupan.

Pengelolaan keuangan (*money management*) pada umumnya merupakan suatu kegiatan pengelolaan dana dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok yang memiliki tujuan untuk memperoleh kesejahteraan keuangan (*financial welfare*). Dalam mencapai kesejahteraan tersebut, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik sehingga uang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak dihabur-haburkan. Untuk bisa menerapkan proses pengelolaan keuangan yang baik, maka dibutuhkan tanggung jawab keuangan untuk melakukan proses pengelolaan uang dan aset lainnya dengan cara yang dianggap positif (Ida dan Cinthia Y.D., 2010).

Pengelolaan keuangan bagi individu/kelompok yang memiliki pendapatan yang memadai masih sering mengalami masalah financial karena perilaku keuangan yang kurang bijak dalam pengambilan keputusan pembelanjaan keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara berhati-hati. Hal ini karena sektor keuangan merupakan sektor yang sensitif terhadap perubahan di sekitarnya. Tanpa pengelolaan yang bijak, sektor keuangan dapat berubah menjadi bencana.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah organisasi masyarakat yang didirikan dan dimotori oleh para tokoh masyarakat, ahli-ahli kebidanan dan aktivis organisasi-organisasi sosial. Pemerintah Orde Baru saat itu, dapat memahami pentingnya program keluarga berencana ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, sehingga menjadi program resmi Pemerintah. Sementara akhir-akhir ini justru telah muncul kecenderungan untuk memungkinkan program ini kembali menjadi milik masyarakat dengan "jargon" gerakan keluarga berencana atau KB Mandiri.

Keluarga berencana sendiri dalam waktu 10 tahun setelah didirikannya PKBI pada Desember 1957 telah menjadi program nasional (dengan didirikannya Lembaga Keluarga Berencana Nasional yang kemudian menjadi BKKBN). Program keluarga berencana yang merupakan salah satu sektor pembangunan memang mengalami



perkembangan yang amat cepat. Suasana dan keadaan lingkungan masyarakat juga terus mengalami perubahan. Pada periode 10 tahun pertama perjalanan perkumpulan ini, keluarga berencana baru merupakan program rintisan yang inisiatifnya dipelopori PKBI.

Kebijakan pengelolaan keuangan kantor PKBI sendiri mempunyai kebijakan yang berbeda dari lembaga-lembaga lainnya. Dari mulai pengelolaan yang detail, tersusun dan transparan juga lebih rumit dari bank sekalipun. Meskipun PKBI sedikit asing ditelinga masyarakat pada umumnya namun PKBI mempunyai kebijakan pengelolaan keuangan PKBI yang unik dimana kebijakan pengelolaan keuangan PKBI berdasar pada GF-ATM (*Global Fund For AIDS, TB And Malaria*). GF-ATM adalah organisasi dunia yang berperan salah satunya untuk menghentikan penyakit AIDS. Segala sesuatu termasuk dari sudut keuangan sekalipun berdasarkan pada prosedur/aturan GF-ATM.

Kebijakan pengelolaan keuangan PKBI sendiri menjelaskan prosedur dan alur keuangan yang sama seperti yang dikelola oleh tiap-tiap cabang di provinsi maupun kabupaten. Karena kebijakan pengelolaan PKBI yang sangat unik itu membuat penulis penasaran.

### **Kerangka Teori**

Secara umum **kebijakan** merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang memiliki sifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang bisa mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tatanilai baru didalam masyarakat.

Carl Friedrich mengemukakan bahwa "Pengertian kebijakan itu merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh kelompok, seseorang, atau juga pemerintah didalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan juga kesempatan-kesempatan terhadap suatu kebijakan yang di usulkan untuk bisa menggunakan serta juga mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau juga merealisasikan suatu sasaran atau juga maksud tertentu. Adapun menurut para ahli, kebijakan adalah sebagai berikut:

#### **Menurut Lasswell (1970)**

Kebijakan ialah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai serta juga praktik-praktik yang terarah (*a projected program of goals values and practices*).

#### **Menurut Anderson (1979)**

Kebijakan ialah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang wajib untuk diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya dalam memecahkan suatu masalah (*a purposive course of problem or matter of concern*).

#### **Menurut Carter V. Good (1959)**

Kebijakan merupakan sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan juga beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang sifatnya itu situasional, dalam mengoperasikan perencanaan yang sifatnya itu umum dan juga memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya suatu tujuan.

#### **Menurut Budiardjo (1988)**

Kebijakan merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau juga kelompok politik didalam usaha memilih tujuan-tujuan serta juga cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

#### **Menurut Mustopadidjaja**

Kebijakan ialah suatu keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk dapat



mengatasi permasalahan tertentu ialah sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan pedoman perilaku dalam :

1. pengambilan sebuah keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik itu kelompok sasaran ataupun (unit) suatu organisasi pelaksana kebijakan,
2. penerapan atau juga pelaksanaan dari suatu kebijakan yang sudah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana ataupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Dari beberapa pengertian Kebijakan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan adalah pertimbangan yang diambil oleh seorang pelaku yang didasarkan pada faktor-faktor pencapaian tujuan, nilai-nilai agar bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi.

#### Macam-Macam Kebijakan

Didalam suatu pemerintah terdapat beberapa macam kebijakan, dibawah ini merupakan macam jenis tersebut, diantaranya:

##### 1. Kebijakan Keuangan

Uang ialah suatu hal penting didalam suatu kehidupan manusia. Uang merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat suatu negara. Uang ini suatu benda yang sudah disepakati bersama ialah sebagai alat perantara tukar menukar didalam suatu hal perdagangan. Terdapat banyak sekali fungsi uang yang sudah kita ketahui. Selain uang ternyata ada juga yang sering kita dengar yakni inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan naik turunnya suatu barang serta jasasacara terus-menerus yang diakibatkan dari tidak adanya keseimbangan arus barang serta juga arus uang.

##### 2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menambah maupun mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter ini biasanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi didalam jangka pendek. Kebijakan moneter ini juga penting didalam pemerintah, sebab hal tersebut juga dapat mempengaruhi perekonomian.

##### 3. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang mengatur tentang penerimaan serta juga pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara diantaranya yakni pajak, penerimaan bukan pajak, dan juga bantuan ataupun pinjaman dalam serta luar negeri. Sedangkan pengeluaran ini dibagi menjadi dua kelompok, yakni pengeluaran bersifat rutin, contohnya yaitu membayar gaji pegawai, belanja ataupun juga pengeluaran yang sifatnya itu pembangunan. Oleh sebab itu kebijakan fiskal ini memang sangat penting bagi suatu pemerintahan. Untuk itu kebijakan fiskal ini memang harus diperhatikan dengan benar.

Pengelolaan keuangan adaah teknik mengimbangi gaya hidup manusia seperti gaya hidup konsumtif dengan gaya hidup produktif seperti investasi, menabung ataupun bisnis. Tujuan pengelolaan keuangan ini adalah agar kita terhindar dari kondisi lebih banyak hutang daripada pemasukan. (Menurut Safir Senduk)

Arti pengeloaan keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana dari perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen umum untuk sumber daya keuangan. Pengelolaan keuangan adalah perencanaan, pengarahan, pemantauan,



pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Dari beberapa pengertian Pengelolaan Keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah perencanaan dan pengendalian keuangan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Fungsi dasar dan tujuan dari pengelolaan keuangan dapat dioptimalkan dari beberapa poin dibawah ini:

- Mengoptimalkan segala rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
- Meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dana yng tidak diinginkan di kemudian hari dalam pelaksanaan sebuah proyek perencanaan.
- Mencapai target perencanaan dengan lebih efisien karena adanya ketersediaan dana yang cukup serta telah direncanakan dan dapat dialokasikan dengan maksimal.
- Menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada dengan cara pemisahan tiap-tiap otoritas dalam pengelolaan keuangan. Contohnya: Pemisahan pengelolaan pencatatan keuangan dengan bagian pengawasan keuangan.
- Memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instansi/organisasi karena adanya transparansi terhadap keuangan yang dimiliki.
- Menciptakan lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana.

#### Perencanaan Pengelolaan Keuangan

Perencanaan pengelolaan keuangan adalah suatu panduan atau pedoman yang disusun guna meraih pencapaian tujuan dan membantu peningkatan nilai organisasi. Dengan melakukan perencanaan dapat diketahui tujuan yang hendak dicapai dan usaha yang harus dilakukan dalam mncapai tujuan tersebut. Langkah perencanaan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut.

- a. Penetapan tujuan perencanaan keuangan secara tepat
- b. Adanya pengevaluasi strategi keuangan
- c. Adanya strategi pengembangan pada sebuah perencanaan dengan membandingkan startegi standar yang telah ditetapkan
- d. Adanya pemeriksaan kebenaran tentang perencanaan keuangan tersebut secara menyeluruh
- e. Perlu peninjauan kembali perencanaan keuangan serta merevisinya sehingga ada kombinasi strategi yang tepat

Kebijakan pengelolaan keuangan adalah kebijakan yang dilakukan agar sektor keuangan dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebijakan pengeloan keuangan mengatur pengeluaran keuangan dan pendapatan keuangan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis. Hal ini perlu dilakukan mengingat pentingnya dampak sektor keuangan. Mulyasa (2002) menjelaskan bahwa tugas kebijakan pengelolaan keuangan dapat dibagi kedalam tiga fase, yaitu:

#### 1. Financial Planning

Financial planning merupakan kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa



menyebabkan efek samping yang merugikan.

## 2. Implementation

Ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.

## 3. Evaluation

Merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.

Ciri-ciri kebijakan keuangan antara lain.

1. Kebijakan keuangan dibuat oleh semua pihak terkait pada organisasi
2. Kebijakan mengelola keuangan dapat diterima oleh semua pihak
3. Kebijakan pengelolaan keuangan tidak merugikan organisasi
4. Kebijakan harus dibuat transparan dan benar-benar untuk memecahkan masalah dalam instansi
5. Kebijakan pengelolaan keuangan organisasi berbeda dengan pengelolaan keuangan organisasi kecil

## Metode Penelitian

Menggunakan Metode Kualitatif, karena penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terjun ke lapangan mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses-proses tersebut. Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang tepat terhadap masalah yang akan diteliti digunakan metode penelitian kualitatif.

Teknik Pengambilan Data

1. Teknik observasi merupakan suatu metode atau teknik pengumpulan data secara langsung pada objek yang diambil atau diteliti di tempat PKL.
2. Teknik wawancara merupakan metode atau teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung dengan pembimbing atau instruktur dan pegawai kantor lainnya.
3. Teknik literatur merupakan metode atau teknik pengumpulan data dengan membaca beberapa buku literatur yang dapat digunakan untuk menunjang dalam penulisan laporan.

## Hasil dan Pembahasan

Kebijakan pengelolaan keuangan adalah kebijakan yang dilakukan agar sektor keuangan dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Kebijakan pengelolaan keuangan mengatur pengeluaran keuangan dan pendapatan keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari adanya krisis dalam sebuah sektor keuangan.

Berikut kebijakan keuangan dalam Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Subang Kabupaten Subang :

### Kebijakan kas kecil

Berdasarkan pemegang kas kecil dalam Kantor PKBI adalah Staff Bagian Keuangan. Berikut penjelasan mengenai kebijakan kas kecil.

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas ini adalah transaksi yang berhubungan dengan *Office Running Cost (ORC)* yang artinya adalah biaya-biaya yang dapat berada di bawah kendali, kendali disini berarti manajer program yang dapat memperbolehkan fleksibilitas dalam penggunaan input agar dapat menyediakan



program secara lebih efisien. *Office Running cost* ini dibiayai dengan kas kecil/*petty cash*. *Office Running Cost* berbeda untuk masing-masing unit, PR (*Principle Recipient*) yaitu kantor pusat dana mempunyai ORC sebesar Rp 4.900.000,- dengan kas kecil maksimal sebesar Rp 3.000.000,- SR (*Sub-Recipient*) atau kantor tiap provinsi mempunyai ORC sebesar Rp 2.150.000,- dengan kas kecil maksimal sebesar Rp 1.500.000,- dan SSR (*Sub-Sub Recipient*) yang artinya adalah kantor tiap kabupaten dan IU (*Impelenting Unit*) atau yang paling bawah diantara unit-unit lainnya mempunyai ORC sebesar Rp 1.125.000,- dengan kas kecil maksimal sebesar Rp 1.000.000,-.

Kas kecil digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari masing-masing unit, dan jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah maksimal yang telah ditentukan, bila terjadi kelebihan maka kelebihan tersebut harus segera disetorkan ke bank.

Menurut Staff Keuangan PKBI, PKBI Cabang Subang sendiri mempunyai ORC sebesar Rp 1.125.000,- dengan kas kecil maksimal sebesar Rp 1.000.000,-, hal itu karena letak Kantor PKBI Cabang Subang berada di wilayah Kabupaten yaitu Subang jadi ada pada unit SSR (*Sub-Sub Recipient*). Berikut kebijakan kas kecil PKBI :

- a. Semua pembayaran kepada pihak lain (misalnya toko-toko) diatas pembayaran melalui kas kecil harus dilakukan melalui cek.
- b. Dana kas kecil hanya dipergunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari seperti fotocopy, pengiriman surat, penggantian klaim biaya transportasi, dan biaya lainnya.
- c. Jumlah pengeluaran maksimum kas kecil untuk SSR (*Sub-Sub Recipient*) sebesar Rp. 500.000 dalam satu bulan.
- d. Apabila jumlah kas kecil sudah mencapai saldo minimum harus secepatnya dilakukan pengisian. Namun apabila ada pengeluaran sampai 1 juta dan tidak bersifat urgent, maka sebaiknya diambil dari bank dan bukan menggunakan dana kas kecil.

Dari keterangan Staff Keuangan PKBI, untuk kebijakan kas kecil diatas Kantor PKBI Cabang Subang telah menjalankan semua kebijakan tersebut.

### **Kebijakan pemberian dana kepada SSR (*Sub-Sub Recipient*)**

Kebijakan dana ini diberikan oleh SR (*Sub Recipient*) atau kantor pusat dana kepada unit SSR PKBI Cabang Subang.

1. SR (*Sub Recipient*) atau kantor tiap provinsi ini memberikan dukungan dana kepada PKBI Cabang Subang atau SSR (*Sub-Sub Recipient*) berdasarkan surat perjanjian kerja atau kontrak yang berasal dari kantor pusat (PR)
2. Hal hal yang harus diperhatikan dalam menerima dana bantuan :
  - Bersedia menjalankan kegiatan sesuai dengan budget yang telah ditentukan.
  - Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam pengeloan dana maupun kegiatan
  - Mempunyai legalitas organisasi yang kuat
  - Sudah ada staf dan fasilitas pendukung di tiap kantor masing-masing
  - Menggunakan rekening bank atas nama lembaga
  - Menurut Manager Program PKBI, Kebijakan pemberian dana ini telah dijalankan Kantor PKBI Cabang Subang, namun sayangnya informasi mengenai kebijakan diatas dirasa penulis masih belum lengkap ataupun optimal.



## Uang Muka

Uang muka adalah pengeluaran dana untuk kegiatan yang tidak langsung dipertanggungjawabkan. Uang muka diberikan oleh PR (*Principle Recipient*) atau kantor pusat kepada tiap-tiap unit.

1. Uang muka dapat diberikan kepada :
  - a. Organisasi: Sebagai bagian dari pembayaran sesuai ketentuan dalam surat perjanjian kerja
  - b. Biaya pelatihan: untuk suatu kegiatan atau pembelian barang yang sudah direncanakan dan disetujui, namun jumlah keseluruhan biaya belum diketahui secara pasti (masih estimasi), seperti misalnya: biaya perjalanan dinas, biaya pelatihan dan biaya-biaya lainnya.
2. Pengeluaran uang muka dilakukan oleh Manajer Program (sesuai kewenangan).
3. Dana tersebut harus dicatat sebagai uang muka dan baru dianggap biaya apabila sudah ada pertanggungjawaban yang dapat diterima.

Ada beberapa syarat untuk uang muka kegiatan dan perjalanan dinas PKBI oleh manajer antara lain:

### Syarat Untuk Uang Muka Kegiatan:

- a. Setiap pelaksana kegiatan harus mengajukan uang muka kegiatan yang disertai dengan rencana perincian biaya kegiatan yang akan dikeluarkan.
- b. Pembayaran uang muka dan rencana perincian biaya kegiatan telah disetujui oleh pemberi otorisasi/ ketua.
- c. Pertanggungjawaban uang muka harus menyertakan laporan hasil kegiatan termasuk daftar absensi peserta dan bukti-bukti pengeluaran asli.
- d. Pertanggungjawaban uang muka harus dilakukan tidak lebih dari satu minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- e. Tidak diperbolehkan mengambil uang muka baru bila uang muka sebelumnya belum dipertanggungjawabkan.

### Syarat Untuk Uang Muka Perjalanan Dinas:

- a. Uang muka untuk perjalanan dinas akan dibayar penuh.
- b. Rencana perincian biaya perjalanan telah disetujui pemberi otorisasi/ ketua.
- c. Pertanggungjawaban uang muka harus diserahkan tidak lebih dari satu minggu setelah selesainya perjalanan dinas.
- d. Biaya terkait dengan perjalanan dengan perjalanan dinas yang tidak dimasukkan dalam item perjalanan dinas hanya dapat diganti apabila didukung oleh bukti yang memadai dan tidak melebihi anggaran yang ditetapkan.

Untuk kebijakan uang muka sendiri, menurut Staff Keuangan PKBI, PKBI Cabang Subang telah menjalankan semua kebijakan diatas, namun berapa nominal yang dikeluarkan kantor untuk membayar uang muka kegiatan maupun perjalanan dinas diatas penulis tidak mengetahuinya.

## Satuan biaya

Semua satuan biaya yang digunakan dalam pengelolaan dana GF-ATM menggunakan satuan biaya yang disepakati oleh 3 PR (*Principle Recipient*) atau kantor pusat dan tidak melebihi Standar Biaya Maksimum Kementrian Keuangan. Penentuan satuan biaya akan didasarkan pada peraturan Pemerintah dan perubahannya serta Peraturan GF-ATM.

Dari kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan diatas, menurut Staff Keuangan, Manager, maupun Pegawai lainnya bahwa dalam masing-masing kebijakan tersebut





semua telah dijalankan kantor PKBI Cabang Subang, namun yang penulis sayangkan disini tidak lengkapnya data maupun informasi dari beberapa kebijakan tersebut membuat kebijakan-kebijakan diatas terkesan kurang jelas.

### **Prinsip PKBI Untuk Mengatur Dana**

Ada beberapa prinsip untuk mengatur dana, diantaranya sebagai berikut.

1. Akuntabilitas (Accountability)  
Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana atau peralatan yang diberikan telah digunakan. Akuntabilitas harus mencakup kepatuhan kepada rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui GF.
2. Konsistensi (Consistency Concept)  
Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi.
3. Transparansi (Transparency)  
Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya. Termasuk didalamnya, menyiapkan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu serta dapat mudah diakses.
4. Integritas (Integrity)  
Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, setiap orang yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus dijaga keamanannya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan.
5. Pengelolaan (Stewardship)  
Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik melalui kehati-hatian dalam perencanaan strategis dan membuat sistem pengendalian keuangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Prinsip-prinsip tersebut menurut pegawai Kantor PKBI Cabang Subang, telah dijalankan sepenuhnya. Namun menurut pendapat penulis, adanya point transparansi diatas justru berbanding terbalik dari arti transparansi sendiri, karena dari sudut data dan informasi mengenai kantor dan bagaimana pengelolaan keuangan PKBI Cabang Subang penulis tidak mendapatkan informasi tersebut secara lengkap dan transparan.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan kebijakan pengelolaan keuangan di atas, penulis akhirnya mengetahui kebijakan-kebijakan yang ada di kantor PKBI cabang Subang mulai dari kebijakan kas kecil, pemberian dana kepada unit SSR PKBI Cabang Subang, uang muka baik untuk kegiatan maupun perjalanan dinas dan satuan biaya. Tak hanya itu ada data gaji pegawai, pendapatan dan pengeluaran program PKBI, prinsip untuk mengatur dana dan jurnal transaksi.

Kebijakan-kebijakan tersebut memang dijalankan semua oleh kantor, namun penulis menyayangkan karena kurang kooperatifnya staff kantor, membuat data/informasi baik dari kebijakan maupun data dari sudut keuangan menjadi tidak lengkap dan tidak transparan seperti prinsip dari PKBI sendiri.



Selain itu, penulis pun pada akhirnya tahu bahwa kebijakan- kebijakan pengelolaan keuangan tersebut berdasar pada aturan GF-ATM (Global Fund For AIDS, TB And Malaria) atau organisasi dunia yang berperan salah satunya untuk menghentikan penyakit AIDS, yang mana GF-ATM sendiri merupakan kiblat dari PKBI.

## Referensi

- Data dan gaji karyawan PKBI. PKBI Cabang Subang
- Febriskaabyan.2019. *Pengelolaan Keuangan*. Jakarta
- Hardjito, Dydiet. 2001. *Teori Organisasi Dan Teknik Pengorganisasian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Indriyono. 1982. *Manajemen Keuangan*.BPFE Yogyakarta
- Jurnal PKBI, PKBI Cabang Subang
- Kusdi.2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*.Salemba Humanika. Jakarta
- Manajemen Keuangan*. Spiritia GF-ATM-17
- Pedoman Pelaksanaan Program HIV AIDS. Yayasan Spiritia
- Pelaporan Keuangan PKB. PKBI Cabang Subang
- Ojo, Olo. 2009. Impact Assessment Of Corporate Culture On Employee Job Performance. *Business Intelligence Journal*, 2(2). 388-397.
- Riduwan. 2012. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Peneliti Pemula*. Bandung. Alfabeta
- Robbins, S.P dan Timothy A. Judge. 2015. *Perilaku Organisasi*, Edisi 16. Jakarta. Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. 2003. *Organizational Behavior*, 10th ed., New Jersey. Prentice-Hall International,Inc.
- Robert. L., dan Jackson Jhon H, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, buku 1 dan buku 2, Terjemahan, Jakarta. Salemba Empat.
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Yasmeen, R., Umar, F., & Fahad, A. 2013. Impact of Rewards on Organizational Performance: Empirical Evidence from Telecom Sector of Pakistan. *Journal of Basic and Applied Scientific Research*, 3(5), 938-946